



PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN DAN KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP INTERNET FINANCIAL REPORTING DISCLOSURE

Rudi Zulfikar*, Nana Nofianti, Azy Nur Faozy*****

,b* Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, rz-zulfikar72@untirta.ac.id, Banten, Indonesia

c Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,

ARTICLE INFO

Article history:

Received 00 Oktober 2018

Received in Revised 00 Oktober 2018

Accepted 00 November 2018

Keywords: internet financial reporting disclosure, Komisaris Independen dan Karakteristik Komite Audit

ABSTRACT

This study aimed to analyze the influence of the proportion of Independent Commissioner and the characteristics Audit Committee to internet financial reporting disclosure. Proportion of Independent Commissioner measured by the ratio of owned Independent Commissioner to Board of Commissioners. Characteristics of the Audit Committee is proxied by the size, Audit Committee's meeting frequency, the Audit Committee expertise in accounting / financial, and the independent parties of the Audit Committee's proportion. Internet financial reporting disclosure is measured by the disclosure items required under the Bank Indonesia Regulation No. 7/50/PBI/2005.

The sample in this research were 90 companies, and samples used in this study were banking companies listed in Bank Indonesia during the years 2011-2014. Statistical method used is multiple regression analysis. Based on the test results show that the proportion of independent commissioner, had no effect to internet financial reporting disclosure. And then, the characteristics of an audit committee comprised of several proxies which are the size of the Audit Committee, Audit Committee's meeting frequency, Audit Committee expertise in financial / accounting, and the independent parties of the Audit Committee had a positive and significant effect to the internet financial reporting disclosure. Size as control variabel had a positive and significant effect to the internet financial reporting disclosure.



Pendahuluan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh proporsi Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit, Frekuensi Rapat Komite Audit, dan Keahlian Komite Audit di bidang finansial/akuntansi, dan proporsi anggota Komite Audit Independen terhadap *Internet Financial Reporting Disclosure* (IFRD) di industri perbankan Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2011-2014.

Menurut *Fair Finance Guide Internasional* (2010) tentang transparansi dan akuntabilitas sektor perbankan terdapat 48 bank di Tujuh negara yang dapat rapor merah transparansi salah satunya Indonesia. Selanjutnya tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* industri perbankan di Indonesia memiliki rerata 75,92%, angka ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan ketentuan pengungkapan 100,00% oleh BAPEPAM-LK (Suhardjanto *et al.*, 2014). Fenomena tersebut mengindikasikan masih kurangnya tingkat transparansi dan kepatuhan pengungkapan, salah satunya *Internet Financial Reporting Disclosure*

Dalam upaya mendorong meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan maka diperlukan mekanisme *monitoring*. *Monitoring* dilakukan melalui mekanisme internal *Board*, salah satunya Komisaris Independen dan Komite Audit. *Monitoring* internal dapat mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank, hal ini sesuai dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 pasal 9 ayat 3. Komisaris Independen merupakan seorang yang independen dari posisi manajemen eksekutif atau fungsi manajemen lainnya dalam perusahaan dan bebas dari hubungan apapun yang dapat mempengaruhi keputusan mereka (Hegazy dan Hegazy, 2010). Sedangkan Komite Audit merupakan aspek *governance* memastikan kualitas audit dan pengawasan pelaporan keuangan melalui internet (Ika dan Ghozali 2011). Komisaris Independen dan Komite Audit diperlukan pihak yang dapat mewakili *principal* dan *stakeholders* dalam memonitor aktivitas manajemen sehingga mendorong manajemen untuk meningkatkan

pengelolaan organisasi menjadi lebih optimal sehingga meningkatkan kepercayaan *shareholders* dan *stakeholder*

Ayuso dan Argondana (2007) menyatakan bahwa Komisaris Independen lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan karena kepentingan mereka tidak terganggu oleh ketergantungan pada organisasi. Sementara itu, DeZoort-Salterio (2001) berpendapat bahwa ahli keuangan dalam sebuah Komite Audit meningkatkan kemungkinan temuan kesalahan pernyataan yang material (*material misstatement*), sehingga dapat dikomunikasikan dan dikoreksi secara tepat waktu.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya Debreceenyet *al.*, (2002) dan Bottiet *al.*, (2014) yaitu penggunaan mekanisme *monitoring internal Governance* diproksikan oleh Komisaris Independen dan karakteristik Komite Audit. Selanjutnya Penelitian ini dengan konteks di Industri perbankan Indonesia.

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi penelitian ini, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi antara lain :

1. Apakah proporsi Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting Disclosure*?
2. Apakah ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting Disclosure*?
3. Apakah Frekuensi Rapat Komite Audit berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting Disclosure*?
4. Apakah Kompetensi Komite Audit di bidang keuangan berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting Disclosure*?
5. Apakah Proporsi Anggota Komite Audit Independen berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting Disclosure*?

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan *agency relationship* sebagai kontrak yang ditetapkan antara prinsipal yang menggunakan jasa agen untuk menjalankan kegiatan usaha dan bekerja untuk kepentingan prinsipal. Manajer sebagai penerima pendelegasian wewenang untuk mengelola perusahaan semestinya dalam setiap tindakannya selalu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik. Tujuan manajer dan pemilik semestinya selalu selaras yaitu meningkatkan

nilai perusahaan (*value maximizing*). Manajemen dalam pengelolaan bank harus berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan pendapat Avdasheva dan Yakovlev (2000) pengelolaan bank dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) yaitu berdasarkan peraturan yang berlaku merupakan bentuk akuntabilitas manajemen terhadap pemilik dan masyarakat. Namun, kenyataannya tujuan setiap pihak tidak selalu sejalan. Manajer lebih *risk averse* daripada pemegang saham (Donald, 2010). Berdasarkan penjelasan Jensen dan Meckling (1976) di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan keagenan adalah hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen dalam organisasi.

Konflik keagenan antara regulator dengan pemilik dan manajer dengan pemilik dapat menimbulkan masalah *moral hazard*, karena tindakan tersebut mempengaruhi tingkat risiko bank. (Dewatripont dan Tirole, 1994; Pinteris, 2002; dan Supriyatno, 2006; Landsman, 2006). Asimetri informasi antara deposan dengan manajemen bank terjadi karena bank mendapatkan dana dari investor individual (deposan) dengan jumlahnya banyak, tetapi deposan tidak mempunyai pengetahuan sebaik manajemen bank tentang nilai aset bank dan kekuatan modal bank serta potensi kebangkrutan bank sesungguhnya (Chu, 1999). Manajer lebih mengetahui indikasi yang dapat menimbulkan kebangkrutan lebih dini dan lebih lengkap karena manajemen lebih mempunyai akses berbagai jenis informasi dari pada deposan. Penyebab lain yaitu rendahnya keinginan para deposan melakukan berbagai fungsi *monitoring* karena deposan kurang mempunyai pengetahuan yang cukup (*unsophisticated*) tentang kegiatan bank (Avdasheva dan Yakovlev, 2000).

Jensen dan Meckling (1976) berpendapat terdapat kecenderungan agen bersikap oportunistik. Hal ini tidak lepas dari penjelasan Eisenhardt (1989) bahwa teori keagenan mengasumsikan bahwa, (1) manusia mengutamakan preferensi pribadi (*self interest*), (2) manusia memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan (3) manusia cenderung menghindari risiko (*risk aversion*). Dengan demikian adanya asimetri informasi mengakibatkan pengelolaan bank tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, salah satunya yaitu tidak transparansi pengelolaan. Bentuk tidak transparansi dalam penelitian ini adalah *Internet Financial Reporting Disclosure*.

Mekanisme *monitoring* melalui mekanisme internal di industri perbankan memiliki tujuan yaitu untuk memastikan bahwa agen bertindak sesuai kontrak dan untuk memenuhi kepentingan masyarakat. *Monitoring* yang optimal menghasilkan suatu *governance outcome* yaitu berkurangnya konflik kepentingan antar pihak yang berkepentingan.

Komisaris Independen dan *Internet Financial Reporting Disclosure*

Komisaris Independen merupakan elemen yang penting dalam memonitori proses pengungkapan laporan keuangan perusahaan (Klein, 2002) dan mempengaruhi reliabilitas dari laporan keuangan (Anderson *et al.*, 2004). Karena Komisaris Independen tidak terpengaruh oleh manajemen, maka mereka cenderung mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para stakeholder-nya (Ratnasari, 2011).

Komisaris Independen memainkan peran penting dalam mengawasi jalannya perusahaan dalam meningkatkan keandalan laporan keuangan perusahaan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dalam pengungkapan laporan keuangan, termasuk *internet financial reporting disclosure* (Kelton dan Yang, 2008) dan juga untuk menjamin sistem pengendalian internal terus berjalan (KNKG, 2006).

Penelitian Kelton dan Yang (2008); Mazzotta dan Brozetti (2013) dan Parlakkaya *et al.* (2015), menunjukkan pengaruh positif Komisaris Independen terhadap *Internet Financial Reporting Disclosure*. Beberapa bukti empiris menunjukkan bahwa Komisaris Independen memainkan peran yang efektif dalam meningkatkan transparansi penungkapan, khususnya *internet financial reporting disclosure*. Sehingga laporan keuangan yang diungkapkan perusahaan akan lebih transparan akuntabel. Dengan demikian hipotesis Penelitian sebagai berikut:

H1 : Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting Disclosure*

Ukuran Komite Audit dan *Internet Financial Reporting Disclosure*

Komite Audit sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan (Anderson *et al.*, 2003), membantu mengurangi kecurangan dalam penyajian laporan keuangan (Beasley *et al.*, 2000; Klein, 2002). Hasil penelitian Abdillah (2013) membuktikan ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting Disclosure*. Komite Audit bertugas memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen (Warsono *et al.*, 2009).

Dengan demikian ukuran Komite Audit yang memadai disimpulkan secara umum dapat menghindari terjadinya masalah keuangan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap *internet financial reporting disclosure* yang disajikan perusahaan. Dengan demikian hipotesis Penelitian sebagai berikut:

H2 : Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting Disclosure*

Frekuensi Rapat Komite Audit dan *Internet Financial Reporting Disclosure*

Pertemuan atau rapat Komite Audit berfungsi sebagai media untuk melaksanakan berbagai perbaikan atau evaluasi yang dibutuhkan, yang termasuk memastikan kualitas laporan keuangan. Frekuensi dan isi pertemuan Komite Audit dipengaruhi oleh berbagai hal salah satunya yaitu tugas, tanggung jawab, dan ukuran perusahaan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 disebutkan bahwa Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya 4 kali dalam satu tahun.

Collier dan Gregory (1999) menyebutkan bahwa frekuensi pertemuan Komite Audit yang lebih sering memberikan mekanisme pengawasan dan pemantauan kegiatan keuangan yang lebih efektif, meliputi persiapan dan pelaporan informasi keuangan perusahaan.

Penelitian Kelton dan Yang (2008); Puspitaningrum dan Atmini (2012); Parlakkaya *et al.* (2015) menunjukkan bahwa Frekuensi Rapat Komite Audit berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting Disclosure*. Dengan demikian pertemuan Komite Audit diharapkan meningkatkan *Internet Financial Reporting Disclosure* melalui fungsi pegawasannya dan pemberian sarannya yang khususnya, sehingga diharapkan kepercayaan stakeholder dapat meningkat. Dengan demikian hipotesis Penelitian sebagai berikut:

H3 : Frekuensi Komite Audit berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting Disclosure*

Keahlian Komite Audit dan *Internet Financial Reporting Disclosure*

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 bahwa anggota Komite Audit wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan. Hal ini dikarenakan agar Komite Audit berfungsi secara efektif dan diharapkan kinerja Komite Audit juga akan lebih tinggi. Serta dapat meningkatkan kualitas *internet financial reporting disclosure* dan mengurangi perilaku oportunistik manajer (Puspitaningrum dan Atmini, 2012) yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder.

Penelitian Kelton dan Yang (2008) serta Yapet *al.* (2011) menemukan bukti bahwa semakin banyak Komite Audit yang mempunyai keahlian keuangan maka akan meningkatkan transparansi dalam *internet financial reporting disclosure*. Sementara Felo *et al.* (2004) menyatakan bahwa keahlian Komite Audit di bidang keuangan berpengaruh positif dengan kualitas laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis Penelitian sebagai berikut:

H4: Keahlian Komite Audit di bidang keuangan berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting Disclosure*.

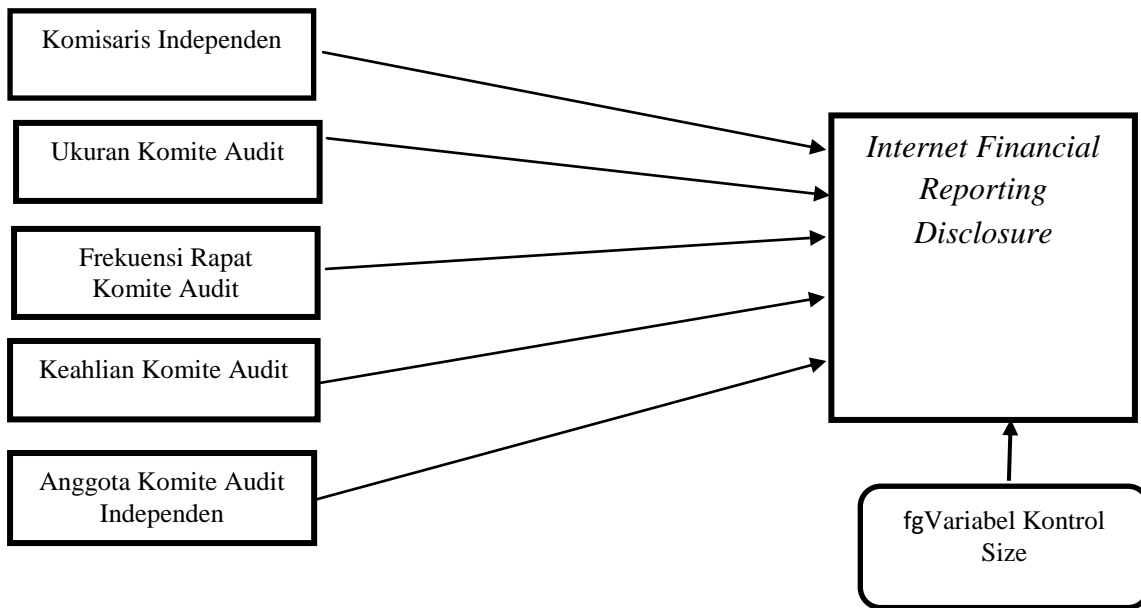
Proporsi Anggota Komite Audit Independen dan *Internet Financial Reporting Disclosure*.

Komite Audit memiliki tugas pengawasan dalam proses pelaporan keuangan dengan cara mengurangi manipulasi dan menjamin informasi berkualitas bagi investor (Klein, 2006). *Agency problem* antara manajer dengan investor diharapkan akan berkurang dalam perusahaan dengan adanya Komite Audit. Proporsi anggota Komite Audit yang independen sangat penting karena dapat meningkatkan fungsi dari Komite Audit itu sendiri. Blue Ribbon Committee (1999) menyatakan bahwa independensi adalah hal yang paling penting dalam Komite Audit yang akan meningkatkan efektivitas Komite Audit. Di Indonesia proporsi anggota Komite Audit yang independen diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Penelitian Bronson *et al.* (2009), membuktikan bahwa fungsi Komisaris Independen akan lebih mudah tercapai jika dibantu oleh Komite Audit sepenuhnya merupakan anggota yang independen. Sehingga diharapkan proporsi anggota Komite Audit yang independen dapat meningkatkan objektivitas dari *internet financial reporting disclosure* yang diungkapkan perusahaan. Dengan demikian hipotesis Penelitian sebagai berikut:

H5: Proporsi anggota Komite Audit Independen berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting Disclosure*

SKEMA KONSEPTUAL PENELITIAN



METODE PENELITIAN

Sampel penelitian ini yaitu industri perbankan yang terdaftar pada Bank Indonesia periode 2011-2014. Alasan pemilihan sektor perbankan dalam penelitian ini karena industri perbankan rawan terjadi *moral hazard*. Dan alasan pemilihan tahun penelitian 2011-2014 didasarkan pada berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/50/PBI/2005 yang mewajibkan perbankan untuk memiliki website perusahaan serta menampilkan *internet financial reporting disclosure*. Jumlah data observasi sebesar 360 data.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan independen (Ghozali, 2011 :96). Menurut Ghozali (2011), uji asumsi klasik terdiri dari: (1) uji normalitas; (2) uji multikolinearitas; (3) uji heteroskedastisitas; dan (4) uji autokolerasi. Persamaan regresinya sebagai berikut:

$$\text{IFRD} = \beta_0 + \beta_1 \text{KI} + \beta_2 \text{UKA} + \beta_3 \text{FKA} + \beta_4 \text{KKA} + \beta_5 \text{IKA} + \beta_6 \text{Size} + \varepsilon$$

Keterangan:

IFRD	: <i>Internet financial reporting disclosure</i>	Jumlah <i>Item Internet Financial Reporting Disclosure</i>
	: Variabel independen	
KI	: Komisaris Independen	Proporsi Jumlah Anggota Komisaris Independen Pada Seluruh Jumlah Anggota Dewan Komisaris
UKA	: Ukuran Komite Audit	Jumlah Komite Audit yang dimiliki perusahaan
FRKA	: Frekuensi rapat Komite Audit	<i>Jumlah rapat Komite Audit yang Diselenggarakan dalam Satu Tahun</i>
KKA	: Keahlian Komite Audit dibidang finansial	Anggota Komite Audit yang memiliki keahlian finansial/keuangan
Size	: Ukuran Perusahaan	Logaritma total aset

Hasil dan Pembahasan

Tabel 1
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimal	Mean	Std. Deviation
IFRD	360	0,37	1	0,8626	0,12889
KI	360	0	1	0,5755	0,25245
UKA	360	0	8	3,3556	1,39087
FKA	360	0	49	10,2472	8,56419
KKA	360	0	1	0,521	0,30391
IKA	360	0	1	0,8491	0,30936
Size	360	26	40	30,6111	2,2164

Hasil pada Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai rerata (*mean*) dari variabel *Internet Financial Reporting Disclosure* (IFED) sebesar 0,86284 yang berarti nilai sebesar 86% dari dari perhitungan 30 item pengukuran yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.7/50/PBI/2005 telah diungkapkan dalam laporan keuangan melalui internet.

Nilai rata-rata untuk Komisaris Independen (KI) memiliki nilai 0,57 atau 57%, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan perbankan rata-rata telah memiliki anggota Komisaris Independen sebanyak 58% dari Proporsi Dewan Komisaris. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.

8/4/PBI/2006, tentang ketentuan jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya 50% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Nilai rata-rata untuk variabel Ukuran Komite Audit(UKA) memiliki rerata sebesar 3,3583 yang menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan Peraturan Bank Indonesia yaitu minimum anggota Komite Audit sebanyak tiga (3) orang.

Nilai rata-rata untuk variabel Frekuensi Rapat Komite Audit(FRKA) memiliki rerata sebesar 10,24 kali pertemuan dalam satu tahun. Tingginya rata-rata rapat yang dilakukan oleh Komite Audit ini menunjukkan tingginya aktivitas Komite Audit dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Nilai rata-rata untuk variabel Keahlian Komite Audit di Bidang Finansial (KKA) memiliki rerata sebesar 0,52 atau sebesar 52% anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan maupun pengalaman di bidang keuangan/akuntansi.

Nilai rata-rata untuk variabel Independensi Komite Audit (IKA) memiliki rerata sebesar 0,849 atau sebesar 85% anggota Komite Audit yang dimiliki perusahaan merupakan anggota Komite audit yang independen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat proporsi anggota Komite Audit yang independen di Indonesia telah sesuai Peraturan Bank Indonesia yaitu minimal 51% anggota Komite Audit merupakan komisaris independen dan pihak yang independen.

Nilai rata-rata untuk variabel kontrol yaitu *Size (Size)* memiliki rerata sebesar 30,61% *Size* akan berkaitan dengan pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Hal ini mengurangi biaya agensi, perusahaan yang lebih besar mengungkapkan informasi yang lebih banyak. Hasil pengujian hipotesis menggunakan program pengolahan data statistik dengan analisis regresi linier berganda.

Tabel 2.
Hasil Analisis Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	P-Value
Constants		0,096	0,002
KI	0,009	0,03	0,755
UKA	0,026	0,006	0
FKA	0,002	0,001	0,041
KKA	0,09	0,02	0
IKA	0,123	0,042	0,004
SIZE	0,009	0,003	0,002
<i>R Square</i>	0,256		
<i>Adjusted R Square</i>	0,24		
<i>F</i>	16,542		
<i>Sig</i>	0,000		

Koefisien Determinasi (*Adjusted R-Square*) pada Tabel 2 didapatkan hasil sebesar 0,24 atau 24%, artinya variasi pada variabel *Internet Financial Reporting Disclosure* (IFRD) dapat dijelaskan sebesar 24% oleh Variabel Komisaris Independen (KI), ukuran Komite Audit (UKA), frekuensi rapat Komite Audit (FKA), keahlian Komite Audit di bidang finansial/akuntansi (KKA), dan independensi Komite Audit (IKA) dengan Size sebagai Variabel kontrol sedangkan sisanya 76% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model. Uji kesesuaian model (F) sebesar 16,542 dengan tingkat signifikansi 0,000, artinya model dapat digunakan untuk penelitian ini.

Pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel Komisaris Independen (KI) tidak memiliki pengaruh terhadap *internet financial reporting disclosure* dengan menunjukkan nilai *t* hitung sebesar 0,312 dan tingkat signifikansi sebesar 0,755 atau dengan kata lain **hipotesis 1 (H1) ditolak**.

Berdasarkan teori agensi, adanya Komisaris Independen diharapkan memberikan iklim yang objektif, independen dan terbuka dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan termasuk dalam *internet financial reporting disclosure*.

Namun dalam penelitian ini tidak terdapat pengaruh antara Komisaris Independen terhadap *internet financial reporting disclosure*. Gunawan (2016) menyatakan bahwa masih minimnya perusahaan yang memiliki Komisaris Independen sehingga belum cukup tinggi untuk membuat komisaris independen mendominasi kebijakan yang diambil oleh dewan komisaris, sehingga keberadaan komisaris independen belum mampu berfungsi sebagai mekanisme *corporate governance* dalam kaitannya peningkatan kualitas pengungkapan laporan keuangan melalui internet. Hal ini diduga pengawasan terhadap manajemen akan lebih efektif jika dibantu oleh peran Komite Audit sehingga dapat dihasilkan *internet financial reporting disclosure* yang lebih baik.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel ukuran Komite Audit (UKA) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *internet financial reporting disclosure* dengan menunjukkan nilai *t* hitung sebesar 4,113 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau dengan kata lain **hipotesis 2 (H2) diterima**.

Rezaee (2007) menjelaskan bahwa komite audit berfungsi untuk melindungi kepentingan investor dengan menjalankan tanggung jawab pengawasan dalam area pengendalian internal, pelaporan keuangan, aktivitas audit dan kepatuhan dalam mengaplikasikan peraturan maupun regulasi. Semakin banyak anggota Komite Audit, semakin meningkat juga fungsi Komite Audit dalam mengungkapkan laporan keuangan melalui internet yang lebih baik. Komite audit

dengan anggota yang cukup akan mampu membatasi perilaku *opportunistic* manajemen melalui informasi serta komite audit mempunyai motivasi yang unik yaitu lebih baik dalam pengawasan terhadap perkembangan dan pemeliharaan modal (Yapet *et al.*, 2011).

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel Frekuensi Rapat Komite Audit (FKA) yang diukur dengan menjumlahkan total dari rapat yang diselenggarakan oleh Komite Audit dalam satu tahun, berpengaruh positif dan signifikan terhadap *internet financial reporting disclosure* dengan menunjukkan nilai thitung sebesar 2,048 dan tingkat signifikansi sebesar 0,041 atau dengan kata lain **hipotesis 3 (H3) diterima**.

Tujuan utama dari rapat yang diadakan adalah untuk menciptakan sebuah koordinasi dari pengawasan pengungkapan laporan keuangan dan melaksanakan pengawasan internal dan *corporate governance* (Puspitaningrum dan Atmini 2012). Semakin banyak frekuensi rapat tinggi koordinasi dalam pengawasan dan semakin efektif sistem pengendalian internal oleh Komite Audit dan mengurangi tindakan oportunistik manajemen dalam hal menyembunyikan sebagian atau seluruh informasi untuk kepentingan pribadi. Hal ini dapat meningkatkan pengungkapan laporan keuangan yang disajikan dalam web perusahaan.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel Keahlian Komite Audit di Bidang Akuntansi/Keuangan (KKA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *internet financial reporting disclosure* dengan menunjukkan nilai thitung sebesar 4,576 dan t tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau dengan kata lain **hipotesis 4 (H4) diterima**.

Felo *et al.* (2004) menyatakan bahwa keahlian Komite Audit di bidang keuangan berhubungan positif dengan kualitas laporan keuangan. Keahlian keuangan komite audit merupakan *background* yang dimiliki oleh komite audit guna menunjang keefektifan pelaksanaan kinerja dari komite audit (Rezaee, 2007). Kelton dan Yang (2008); dan Yap *et al.* (2011) menemukan bukti bahwa semakin banyak komite audit yang mempunyai keahlian keuangan maka akan meningkatkan transparansi dalam *internet financial reporting disclosure*.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel Proporsi anggota Komite Audit yang independen (IKA) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *internet financial reporting disclosure* dengan menunjukkan nilai thitung sebesar 2,902 dan tingkat signifikansi sebesar 0,004 atau dengan kata lain **hipotesis 5 (H5) diterima**.

Klein (2002) dan Bedrad *et al.*, (2004) menunjukkan bahwa proporsi anggota Komite Audit yang independen yang semakin tinggi akan mengurangi praktek manajemen laba. Bronson *et al.* (2009), menyatakan bahwa fungsi Komisaris Independen akan lebih mudah tercapai jika dibantu oleh Komite Audit sepenuhnya merupakan anggota yang independen. Sehingga dalam hasil

penelitian ini, proporsi anggota Komite Audit yang independen dapat meningkatkan objektivitas dari *internet financial reporting disclosure* yang diungkapkan perusahaan.

Kesimpulan

Karakteristik data yang nampak melalui analisis deskriptif ini menunjukkan rata-rata sebesar 86% ini menunjukkan bahwa tingkat *internet financial reporting disclosure* di Indonesia masih rendah, hal ini dikarenakan pengungkapan wajib di industri perbankan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.

Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh terhadap *internet financial reporting disclosure*. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji regresi berganda menunjukkan bahwa ukuran Komite Audit, frekuensi rapat Komite Audit, keahlian Komite Audit di bidang finansial/akuntansi, dan proporsi anggota Komite Audit yang independen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *internet financial reporting disclosure*.

Saran

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya Bank Indonesia sebagai regulator meninjau kembali kriteria independensi dewan komisaris. Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang diharapkan dapat diperbaiki melalui penelitian serupa dimasa yang akan datang, yaitu :

Perusahaan disarankan untuk meningkatkan kepercayaan *stakeholder* pada perusahaan perbankan dengan cara meningkatkan transparansi *internet financial reporting disclosure*.

Penelitian selanjutnya bisa memasukkan faktor-faktor *corporate governance* lain seperti struktur kepemilikan ke dalam model penelitian, agar pengaruh dari struktur kepemilikan yang juga mempengaruhi kebijakan *internet financial reporting disclosure* perusahaan ini tidak diabaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, L., Park, Y. J., dan Parker, Susan. 2000. The Effects of Audit Committee Activity and Independence on Corporate Fraud. *Managerial Finance*. Vol 26. No 11, pp. 55-67.
- Akbar F. N. 2014. Efektivitas Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan: Studi Empiris pada Perusahaan Publik yang Terindikasi Kesulitan Keuangan Tahun 2010-2012. *Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*.
- Almilia, L. S. 2009. Analisa Komparasi Indeks Internet Financial Reporting Pada Website Perusahaan Go Publik Di Indonesia. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi*.
- Anand, S. 2008. Essentials of Corporate Governance. *New Jersey: Wiley & Sons*.
- Anderson, K. L., Gillan, Stuart dan Deli, D. N. 2003. Boards of Directors, Audit Committees, and the Information Content of Earnings. *Weinberg Center for Corporate Governance Working Paper No. 2003-04*.
- Anderson, R. C., Mansi, Sattar A. dan Reeb, D. M. 2004. Board Characteristics, Accounting Report Integrity, and the Cost of Debt. *Journal of Accounting and Economics*. Vol. 37, p p. 315-342.
- Ashbaugh, H., Johnstone, K., dan Warfield, T. 1999. Corporate Reporting On the Internet. *Accounting Horizons*, Vol. 13, pp. 241-57.
- Ball, R. 2006. International Financial Reporting Standards (IFRS): Pros and Cons for Investors. *Accounting & Business Research*. Vol. 36 (4).
- Bapepam. 2012. Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. *Keputusan Ketua Badan Pengawas pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-643/BL/2012*.
- Beasley, M. S., Carcello, J. V., Hermanson, D. R. dan Lapedes, P. D. 2000. Fraudulent Financial Reporting: Consideration of Industry Traits and Corporate Governance Mechanisms. *Accounting Horizons*. Vol. 14 (4), pp. 441-454.
- Bédard, J., Marakchi-Chtourou, S., dan Courteau, L. 2004. The Effect of Audit Committee Expertise, Independence, and Activity on Aggressive Earnings Management, Auditing. *Journal of Practice and Theory*. Vol. 23, pp. 13-35.
- Bipin, A. S., Bhojraj, dan Sengupta, P. 2005. The Association Between Outside Directors, Institutional Investors and the Properties of Management Earnings Forecasts. *Journal of Accounting Research*, Vol. 43, pp. 343-376.
- Blue Ribbon Committee (BRC). 1999. Audit Committee Characteristic and Restatement: A Study of the Efficacy of Certain Blue Ribbon Committee Recommendations. *New York: New York Stock Exchange and National Association of Securities Dealer*.
- Botti, L., Boubaker, S., Hamrouni, Amal dan Solonandrasana, Bernardin. 2014. Corporate Governance Efficiency and Internet Financial Reporting Quality. *Review of Accounting and Finance*. Volume 13, issue 1 pp.43-64.
- Budisantoso, T. dan Triandaru, S. 2006. "Bank dan Lembaga Keuangan Lain". *Jakarta : Salemba Empat*.

- Collier, P. Dan Gregory, A. 1999. Audit Committee Activity and Agency Cost. *Journal of Accounting and Public Policy*, 18, Pp. 311-332.
- Debreceeny, R., Gray, G. R., dan Rahman, Asheq. 2002. The Determinants of Internet Financial Reporting. *Journal of Accounting and Public Policy*. Vol. 21, pp. 371–394.
- DeZoort, F.T., Hermanson, D.R., Archambeault, D.S., and Reed, S.A. 2002. Audit Committee Effectiveness: A Synthesis of the Empirical Audit Committee Literature. *Journal of Accounting Literature*. Vol. 21 pp. 38-74.
- Evans, T. G. 2003. Accounting Theory: Contemporary Accounting Issues. *Australia: Thomson, Shouth-Western*.
- Felo, A.J., Krishnamurthy, S., Solieri, S.A. 2003. Audit committee characteristics and the perceived quality of financial reporting: An empirical analysis. *Working paper*.
- Financial Accounting Standards Board (FASB). 2000. Electronic Distribution of Business Reporting Information.
- Fitriana, M. R. 2009. Analisis Pengaruh Kompetisi dan Karakteristik perusahaan terhadap Luas Pengungkapan Informasi Keuangan dalam website Perusahaan. *Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. 2005. “Corporate Governance Self Assessment Checklist Forum for Corporate Governance in Indonesia. 3rd edition. www.fcgi.or.id
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Hendro, T. Dan Rahardja, C. T. 2014. Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia. *UPP STM YKPN*.
- Hodge, F.D., Kennedy, J.J., dan Maines, L.A., 2004. Does search facilitating technology improve the transparency of financial reporting?. *The Accounting Review*. Vol. 79 (3), pp. 687–703.
- Ika, A. S. Dan Gozali, I. 2011. Pengaruh Kompleksitas Tugas Audit dan Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Kualitas Audit dengan Moderasi Pemahaman Mengenai Sistem Informasi. Skripsi. *Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang*.
- International Accounting Standard Committee (IASC). 1999. Business Reporting on The Internet.
- Jensen, M.C. and Meckling, W. H. (1976), Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* Vol. 3. pp. 305 – 360.
- Kartika, A. 2009. Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. Vol 16(1), Hal. 1-17.
- Kelton, A. S. dan Yang, Y. 2008. The Impact of Corporate Governance on Internet Financial Reporting. *Journal of Accounting and Public Policic*. Vol 27, pp. 62–87.
- Khan, T. 2006. Financial Reporting Disclosure On The Internet: An International Perspective. *Faculty of Business and Law School of Accounting, Victoria University, Australia*.

- Khomisyah. 2005. Analisis Hubungan Struktur dan Indeks Corporate Governance dengan Kualitas Pengungkapan. Disertasi. *Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.*
- Khomsiyah dan Susanti. 2003. Pengungkapan Asimetris Informasi dan Cost of Capital. *Proceeding.Simposium Nasional Akuntansi VII. Surabaya, 16-17 Oktober 2003, hal. 200-209.*
- Klein, A. 2006. Audit Committee Board of Director Characteristic, and Earnings Management. *Journal of Accounting and Economics. Vol. 33 No. 3, pp.375-400.*
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2002. Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. Pedoman Umum Corporate Governance Indonesia.
- Lukviarman, N. 2005. Perspektif Shareholding Versus Stakeholding di dalam Memahami Fenomena Corporate Governance. *Jurnal Siasat Bisnis. No. 1 Vol. 2*
- Martani, D., Silvia V., Wardhani R., Farahmita A., Tanuwidjaya T. 2012. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK, Buku 1. Jakarta. *Salemba Empat.*
- Mazzotta, R. dan Bronzetti, G. 2013. The Impact of Corporate Governance on Internet Financial Reporting in Concentrated Ownership Companies. *Organizational Change and Information Systems, Lecture Notes in Information Systems and Organisation 2.*
- Monks, Robert, A.G., dan Minow, N. 2008. Corporate Governance: 4th Edition. USA: *John Wiley & Sons Inc.*
- Ojah, K. dan Mokoaleli-Mokoteli, T. 2012. "Internet Financial Reporting, Infrastructures and Corporate Governance: An International Analysis. *Review of Development Finance. Vol. 2, pp 69-83.*
- Organization for Economic Cooperation and Development. 2006. Methodology for Assessing the Implementation of The OECD Principles on Corporate Governance. www.oecd.org
- Parlakkaya, R., Kahraman, U. dan Cetin H. 2015. "The Effects of the Corporate Governance on the Level of Internet Financial Reporting: Evidence from Turkish Companies. *World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic and Management Engineering. Vol. 9, No. 3.*
- Peraturan Bank Indonesia. 2001. Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Nomor 3/22/PBI/2001
- Peraturan Bank Indonesia. 2006. Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. Nomor 8/4/PBI/2006.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. 2009. Penyajian Laporan Keuangan.
- Probal, D. dan Bose, S. 2007. Web-based corporate reporting in Bangladesh: an exploratory study. *The Cost and Management. Vol. 35, hal. 29-45.*

- Puspitaningrum, P. Dan Atmini, S. 2012. Corporate governance mechanism and the level of internet financial reporting: Evidence from Indonesian companies. *Procedia Economics and Finance* 2 (2012) 157 – 166.
- Ratnasari, Y. 2011. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Luas Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Dalam Sustainability Report. FE UNDIP Semarang.
- Rezaee, Z. 2007. Corporate Governance Post – Sarbanes Oxley. First Edition. *John Wiley & Sons, Inc.*
- Sari, I. P. Dan Gozali, I. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Praktik Penerapan Internet Financial Reporting (IFR) Pada Perbankan di Indonesia. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro: Semarang.
- Scott, W. R. 2003. Financial Accounting Theory. Edisi Ketiga. *Pearson Education Canada Inc.*
- Sekaran, U. 2006. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Jakarta: *Salemba Empat*.
- Surat keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta (BEJ). 2000. Pembentukan Komite Audit Emiten dan Perusahaan Publik. Nomor Kep 315/ BEJ/06-2000.
- Suwardjono. 2010. Teori Akuntansi: Perencanaan dan Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga Cetakan Keempat. Yogyakarta: *BPFE*.
- Tjager, I. N, et al. (2003). Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia. PT. Prehallindo: Jakarta.
- Warsono, S. Amalia, F., dan Rahajeng, D.K.. 2009. Corporate Governance Concept and Model: Preserving True Organization Welfare. *Center for Good Corporate Governance Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM*.
- Yap, D. K.-H., Saleh, D. Z., dan Abessi, D. M. 2011. Internet Financial Reporting And Corporate Governance In Malaysia. *Australian Journal Of Basic And Applied Sciences*, 5(10), 1273-1289.